

---

## EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DI TENGAH REVOLUSI INDUSTRI 4.0

**Hafsah Aqilla<sup>1</sup>, Denta Amelia<sup>2</sup>, Fatiya Rahmah<sup>3</sup>, Aria Budi Abraham<sup>4</sup>, Faizi<sup>5</sup>**

<sup>1-5</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jakarta-Indonesia

Korespondensi: 2110112037@mahasiswa.upnvj.ac.id

---

**Abstract:** In the last decade, the discussion around the fourth industrial revolution which emphasizes on the automation of all aspects of life has increased. The fourth industrial revolution, which is synonymous with technological sophistication, gives us an idea of a futuristic reality and this is certainly inseparable from large-scale development that must be encouraged. Even so, in the midst of seemingly relentless development, there is a group of people who seem to be deliberately distancing themselves and sticking to customs and traditions. Therefore, despite today's development narrative which is still centered in urban areas, it is important to see the industrial revolution 4.0 that we are experiencing today from the perspective of a group of people who are often referred to as Indigenous Peoples. In addition to fighting against urban hegemony, this paper also tries to question the meaning of development and the fourth industrial revolution and its implications for different stakeholders. Indigenous peoples respond to this situation by trying to create a concept of a rival economy against a growth economy with predatory characteristics. This competitive economy is referred to as the Nusantara Economy and prioritizes drastic emphasis on production-consumption activities (degrowth) as well as local, collective and community-based ownership of living space (the commons).

**Keywords:** *Indigenous Peoples, Fourth Industrial Revolution, Development, Technology*

**Abstrak:** Dalam satu dekade terakhir, perbincangan seputar revolusi industri 4.0 yang menekankan pada otomatisasi semua lini kehidupan kian meningkat. Revolusi Industri 4.0 yang identik dengan kecanggihan teknologi memberikan kita gambaran akan realitas yang futuristik dan hal tersebut tentunya tidak terlepas dari pembangunan skala besar yang harus terus digenjut. Meski begitu, di tengah pembangunan yang seakan tanpa henti, ada sekelompok masyarakat yang seperti dengan sengaja menjauhkan diri dan tetap berpegang teguh pada adat dan tradisi. Di tengah narasi pembangunan hari ini yang berpusat di urban, rasanya penting untuk melihat revolusi industri 4.0 yang sedang kita alami hari ini dari kacamata sekelompok masyarakat tadi yang sering disebut juga Masyarakat Adat. Selain melawan hegemoni perkotaan, tulisan ini juga mencoba untuk mempertanyakan kembali apa makna pembangunan dan revolusi industri 4.0 serta implikasinya terhadap berbagai aktor yang berbeda. Masyarakat Adat merespons situasi ini dengan mencoba menciptakan suatu konsep ekonomi tanding terhadap ekonomi pertumbuhan yang berkarakter pemangsa. Ekonomi tanding ini disebut sebagai Ekonomi Nusantara dan mengedepankan penekanan kegiatan produksi-konsumsi secara drastis (degrowth) serta kepemilikan ruang hidup secara lokal, kolektif dan berbasis komunitas (the commons).

**Kata Kunci:** *Masyarakat Adat, Revolusi Industri 4.0, Pembangunan, Teknologi*

## A. Pendahuluan

Setiap bicara soal pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, narasi yang dibawa oleh media arus utama hampir selalu berpusat di perkotaan. Masyarakat yang tinggal di daerah rural dan jauh dari kawasan urban, seperti Masyarakat Adat, seringkali dieksklusikan dari pembicaraan tersebut karena dipandang terbelakang, tertinggal dan oleh karenanya irelevan dengan situasi perekonomian hari ini. Kacamata superioritas yang digunakan oleh masyarakat urban akhirnya mendorong Masyarakat Adat di kawasan rural untuk mengejar ketertinggalan mereka dan salah satu narasi yang paling kencang digaungkan hari ini adalah untuk menyambut Revolusi Industri 4.0. Penelitian dengan judul *The Idea of Progress, Industrialization, and the Replacement of Indigenous Peoples: The Muskrat Falls Megadam Boondogle*. Diambil dari jurnal *Social Justice Vol. 44 No. 4*, diteliti oleh Colin Samson pada tahun 2017 di Inggris. Penelitian ini membahas tentang bagaimana gagasan seputar pembangunan dan kemajuan yang sekarang sering digaungkan oleh pemerintah maupun korporasi untuk melancarkan jalannya pembangunan dan memudahkan sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan terdampak sebenarnya memiliki kaitan erat dan sebuah keberlanjutan dari kolonialisme dan imperialisme di masa lalu. Hasil kesimpulan dengan metode kualitatif ini menunjukkan bahwa dibalik kemenangan teknologi dan akumulasi profit yang sering dibanggakan, ada pemusnahan budaya dan sumber penghidupan Masyarakat Adat yang telah mewarisi tanah leluhur secara turun-temurun.

Secara definitif, sebenarnya tidak ada satu pengertian mengikat dan absolut yang mewakili siapa itu Masyarakat Adat. Hal ini pernah disampaikan oleh Erica-Irene A. Daes, ketua Kelompok Kerja tentang Populasi Masyarakat Adat (WRIP), “tidak ada definisi tunggal yang dapat menggambarkan keragaman Masyarakat Adat di seluruh dunia dan memiliki definisi yang universal pada masa sekarang merupakan hal yang tidak diinginkan atau memungkinkan untuk terjadi.” (Morgan, 2011). Meski begitu, banyak ahli dan lembaga yang telah melakukan pendefinisian sendiri terhadap Masyarakat Adat, salah satunya AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang mendefinisikan Masyarakat Adat sebagai “komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya

yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya” (AMAN, 2001:9).

Pengakuan terhadap eksistensi Masyarakat Adat sebenarnya sudah tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup.” Namun, situasi hari ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Catahu AMAN 2020 menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional Masyarakat Adat masih berjalan di tempat, terlebih dengan hadirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan karpet merah bagi kepentingan kelompok pemodal dan investasi skala besar tanpa mempertimbangkan secara serius aspek sosio-ekologis yang ditimbulkannya. Dengan adanya UU Cipta Kerja, wacana pembangunan dan investasi skala besar kian kencang diserukan serta dikemas dalam bingkai narasi baru, yaitu Revolusi Industri 4.0.

Dimaknai sebagai perubahan menyeluruh dalam sektor industri melalui digitalisasi dan otomatisasi (Tay et al. 2018), berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) semakin lantang menggaungkan pentingnya pembangunan infrastruktur digital untuk mendorong perubahan tersebut. Namun, seberapa jauh upaya transisi yang dimaksud di atas dan apa implikasinya terhadap kelompok masyarakat rentan, khususnya Masyarakat Adat, yang jarang dibicarakan dalam percakapan yang bersinggungan dengan topik tersebut karena istilahnya yang terlampau teknis?

Dengan menggunakan metode literatur review, tulisan ini bertujuan untuk menelisik posisi dan keterkaitan yang menghubungkan antara kelompok Masyarakat Adat dengan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan secara umum serta mempertanyakan kembali sejauh mana makna pertumbuhan ekonomi yang sering dijadikan sebagai alat justifikasi pembangunan skala besar di berbagai wilayah di Indonesia belakangan ini.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah *literature review*, yaitu sebuah pencarian literatur nasional maupun internasional yang dilakukan

dengan menggunakan database dari ResearchGate, JSTOR, jurnal universitas yang didapatkan dengan menggunakan mesin pencarian terarah 'Google', dan buku koleksi pribadi. Pada tahap awal pencarian artikel jurnal diperoleh 27.746 artikel dari 2011 sampai 2015 menggunakan kata kunci "*Indigenous Peoples and civilization*", "pembangunan dan revolusi industri 4.0", dan "*catching up development theory*" yang diidentifikasi dan belum dieksplorasi relevansinya dengan artikel untuk dikompilasi. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 23 artikel yang dianggap relevan. Dari jumlah artikel tersebut, ada 4 artikel yang memiliki kriteria penuh dan 5 artikel yang memiliki kriteria menengah.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan hasil artikel yang dikumpulkan dan analisa penulis didapatkan bahwa Masyarakat Adat kian terancam keberadaannya di tengah arus Revolusi Industri 4.0. Hal ini disebabkan oleh relasi antar keduanya yang bersifat subordinatif dimana yang satu mendominasi yang lain. Digitalisasi dan otomatisasi di sektor industri telah menghegemoni dalam kehidupan bermasyarakat hingga akhirnya mengancam kelompok masyarakat rentan, seperti Masyarakat Adat, yang telah terlebih dahulu dieksploitasi secara sistemik lewat kolonialisme di masa lalu yang polanya masih terus berlangsung hingga hari ini.

Eksplorasi tersebut berlangsung di berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek budaya, sosial, ekologi, ekonomi, dan masih banyak lagi, dengan tujuan untuk melakukan devaluasi atau penghilangan terhadap nilai-nilai kebudayaan yang menjadi penghubung Masyarakat Adat dengan alam yang menjadikan mereka ada dan mengada. Devaluasi atau penghilangan nilai budaya ini menjadi tahapan penting dalam proses kolonialisme karena tanpa adanya penaklukan budaya tersebut, penjajahan akan menjadi sesuatu yang 'mengejutkan' dan 'tidak masuk akal' bagi masyarakat setempat (Mies, 2014, p. 56).

Para penjajah membawa nilai-nilai mereka ke wilayah jajahan dan memaksakannya kepada masyarakat setempat dengan narasi 'memperkenalkan peradaban'. Banyak nama yang mereka gunakan untuk membungkus narasi tersebut. Misalnya, Inggris membenarkan penjajahan yang mereka lakukan sebagai 'beban orang kulit putih' (*white man's burden*), Prancis dengan misi pembudayaan (*mission civilisatrice*) mereka, dan Amerika dengan upaya yang mereka sebut

sebagai 'mewujudkan takdir' (*manifest destiny*) (Pearcey, 2013, p. 2-3). Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkenalkan apa itu peradaban kepada kelompok masyarakat yang mereka nilai sebagai barbar, liar, dan tidak beradab.

Melalui kacamata inilah para penjajah tersebut membenarkan tindakan kejam mereka di wilayah jajahan yang berupaya pemaksaan otoritas dan penundukan terhadap masyarakat setempat hingga akhirnya melahirkan berbagai kebijakan kolonial yang sifatnya cenderung sentralistis atau terkonsentrasi di satu pusat kekuasaan dan otoriter. Proses memperkenalkan 'peradaban' ini dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama dan sifatnya sistemik. Ia merasuk dalam sistem hukum, sistem pendidikan hingga sistem kebudayaan di wilayah jajahan. Di kawasan urban, standar peradaban yang dikenalkan penjajah cepat berkembang karena di sanalah letak pusat kekuasaan kolonial sehingga jauh lebih mudah untuk memperkenalkan standar kemajuan dan kesejahteraan yang seragam dan kuantitatif hingga lahirlah apa yang kita kenal sebagai peradaban kota hari ini. Masyarakat yang jauh dari modernitas dan standar-standar beradab, sejahtera, dan maju ala perkotaan, akhirnya dianggap sebagai ancaman terhadap integritas wilayah jajahan, yang kini menjelma menjadi negara (ibid, p. 4).

Kelompok masyarakat tadi akhirnya hanya memiliki dua pilihan: tetap bertahan dengan keadaan mereka yang berpegang pada tradisi leluhur dan bersikap sangat selektif terhadap pengaruh dari luar atau mengejar ketertinggalan? Tiap pilihan memiliki konsekuensinya masing-masing. Memilih opsi pertama berarti harus siap menghadapi gempuran dari luar yang akan terus menerjang, sedangkan memilih opsi kedua berarti harus siap menanggalkan identitas budaya yang menjadikan diri mereka ada dan meninggalkan tanah tempat kelahiran mereka yang diwariskan oleh leluhur secara turun-temurun. Dewasa ini, banyak yang akhirnya menjatuhkan pilihan pada opsi kedua untuk mengejar ketertinggalan pembangunan atau yang sering disebut juga *catching up development*.

Konsep mengejar ketertinggalan pembangunan ini sebenarnya pertama kali diperkenalkan oleh Walt Whitman Rostow, seorang mantan penasihat keamanan AS. Ia mendorong kelompok masyarakat di suatu kawasan tertentu, khususnya yang berada di negara-negara Global Selatan, untuk mengejar ketertinggalan mereka supaya dapat berada di level yang sama dengan negara-negara di Global Utara.

Banyak para ahli ekonom yang mengkritisi narasi mengejar ketertinggalan ini sebagai pembenaran terhadap relasi kolonial antara Selatan dan Utara, mengingat eksploitasi yang dilakukan penjajah di masa lalu secara langsung memiskinkan masyarakat di wilayah jajahan dan membuat mereka bergantung pada negara-negara industri untuk mendapatkan produk yang menjadi kebutuhan sehari-hari (Mies, 2014, p. 55). Walau begitu, terlepas dari berbagai kritik yang diberikan pada konsep tersebut, nyatanya banyak pemimpin di seluruh dunia yang masih mengadopsi pola pikir ini, tak terkecuali di Indonesia. Gagasan tentang progres dan kemajuan yang tadi dikemas dalam istilah 'peradaban' memiliki hubungan erat dengan Revolusi Industri yang pertama terjadi sepanjang abad ke-18 hingga 19 dan merupakan transformasi skala besar industri dan ekonomi di Inggris yang diasosiasikan dengan kehadiran teknologi baru, seperti mesin uap, di pabrik-pabrik (Uppal, 2021, p. 196). Kemunculan teknologi baru ini dianggap revolusioner karena ia memberikan jalan terhadap kegiatan produksi skala besar dalam waktu yang relatif lebih singkat jika dibandingkan dengan industri kerajinan tangan (handicraft).

Bagi sebagian orang, industrialisasi membawa kesejahteraan. Namun, kenyataannya ketika revolusi industri pertama dimulai, ada peningkatan populasi orang miskin di Inggris, kondisi lingkungan kerja yang buruk bagi jutaan orang, dan buruh yang diupah rendah (ibid). Meski begitu, kondisi buruk ini akhirnya diabaikan karena ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan sepanjang periode tersebut, khususnya di sektor industri besi dan katun, pertambangan Batubara, pembangunan jalan dan kanal, serta perdagangan asing (ibid, p. 197). Pertumbuhan ekonomi yang disinggung di atas diukur menggunakan sebuah sistem neraca perekonomian nasional yang pertama dicetuskan oleh William Petty, seorang ahli ekonomi-politik Inggris pada 1600-an, dan berdasar pada nilai tanah. Tujuan awalnya diciptakan neraca ini adalah untuk memudahkan pemerintah dalam menghitung pemasukan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi Inggris modern (Fioramonti, 2017, p. 4). Penerapan sistem ini dilakukan dengan adanya pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pemilik (para tuan tanah), kelas produktif (para buruh tani), dan kelas steril (kaum tukang, kaum profesional, pedagang, dan raja).

Pembagian masyarakat ke dalam fungsi produktif dan tidak-produktif ini berperan besar dalam perkembangan ilmu ekonomi-politik modern (ibid, p. 5). Hal tersebut dapat kita lihat lewat pernyataan bapak ekonomi klasik, Adam Smith, yang mengatakan bahwa kekayaan bangsa-bangsa dihasilkan oleh kerja produktif setiap individu, dan dengan menggunakan argumen Petty soal nilai tanah sebagai pijakan, Smith pun beropini bahwa pendapatan sebuah negara dihasilkan oleh "seluruh hasil tahunan dari tanah dan tenaga kerja" dalam karyanya yang tersohor *The Wealth of Nations*. Pendapat Adam Smith, William Petty, dan ahli ekonomi klasik lainnya yang menyadari adanya urgensi sebuah sistem neraca perekonomian nasional untuk mengukur kekayaan suatu bangsa inilah yang di kemudian hari melahirkan apa yang sekarang kita kenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Dewasa ini, PDB menjadi satu neraca perekonomian yang berlaku secara universal karena efisiensinya mengingat ia hanya menjelma dalam satu angka tunggal yang setiap tiga bulan menunjukkan kepada kita seberapa cepat atau lambat perekonomian sebuah negara tumbuh (ibid, p. 7). Secara kasar, angka PDB dapat dihasilkan dari rumus berikut:

$$\text{PDB} = \text{Konsumsi} + \text{Investasi} + \text{Belanja Pemerintah} + \text{Ekspor} - \text{Impor}$$

Meski hari ini PDB telah dianggap seperti 'satu formula untuk semua' (*one size fits all*), banyak ahli ekonom yang mengkritisi bagaimana PDB hanyalah rumus yang menerjemahkan siklus produksi-konsumsi yang kompleks ke dalam angka tunggal dan terkesan mengabaikan eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari ekspansi profit untuk meningkatkan angka PDB karena karakteristiknya yang hanya dirancang untuk memotret kuantitas produksi dalam suatu kurun waktu, tanpa melihat jenis dan jangka waktu penggunaan produk tersebut.

Terlepas dari berbagai kritik yang ada, PDB tetap digunakan sebagai standar penentu kesejahteraan suatu bangsa. Melihat rumus di atas, kita dapat mengambil satu poin penting bahwa PDB berbanding lurus dengan tingkat konsumsi dan investasi suatu bangsa. Artinya, semakin besar belanja dan investasi suatu negara, maka semakin besar pula PDB negara tersebut. Sistem pengukuran seperti PDB ditambah adanya dorongan bagi negara-negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan pembangunan barangkali cukup menjelaskan mengapa di banyak

negara Global Selatan, seperti Indonesia, investasi skala besar seakan mendapat karpet merah dalam berbagai kebijakan.

Revolusi Industri 4.0 mendapatkan porsi khusus dalam pembahasan kali ini karena beberapa waktu ke belakang, narasi ini menjadi salah satu yang paling sering dibawakan untuk menggenjot pembangunan di Indonesia. Tahun lalu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian terus mendorong sektor manufaktur di tanah air untuk memanfaatkan teknologi industri 4.0 guna meningkatkan daya saing industri di kancah global supaya dapat meningkatkan kontribusi ekspor netto hingga 10% dari PDB dan masuk jajaran 10 ekonomi terbesar di tahun 2030 (Kemenperin, 2020). Sayangnya, proses industrialisasi tak bisa dan tak akan pernah bisa menjadi proses yang bersifat netral secara politik dan menjamin akan membawa kemajuan bagi semua, karena proses yang berskala besar dan bersifat top-down tersebut lebih banyak menguntungkan mereka yang memiliki kepentingan dan berkuasa secara ekonomi maupun politis (Samson, 2017, p. 17). Sejak dahulu, kehidupan Industrial selalu identik dengan kekerasan karena ia merupakan sebuah konsep yang dipaksakan oleh kuasa kolonial terhadap masyarakat asli (sekarang Masyarakat Adat) di wilayah jajahan secara brutal dan sering diasosiasikan dengan penyiksaan, penaklukan serta penularan wabah penyakit yang bersifat fatal (ibid, p. 5). Brutalitas tersebut terus terjadi hingga hari ini terhadap Masyarakat Adat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, dengan skala yang semakin intens. Kelompok masyarakat yang tanahnya sering menjadi sasaran untuk kegiatan industri yang satu ini biasanya jauh dari pusat kota dan umumnya berisi sekelompok orang yang menjaga keberlangsungan budaya mereka berdasarkan hubungan komunal dengan lingkungan di sekitarnya (Böhm et al. 2014). Salah satu wujud nyatanya adalah perampasan kawasan hutan yang terjadi pada Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa di Hutan Akejira, Halmahera Tengah, Maluku Utara untuk kawasan industri tambang nikel yang telah menggempur kawasan tersebut sejak tahun 1970-an.

Jikalau masyarakat setempat dilibatkan, partisipasi mereka pun hanya akan terbatas pada posisi pekerja bawahan dengan gaji seadanya dan harus menapaki tangga menuju masyarakat industrial (Boutet, 2015, p. 175-179). Perampasan dan penyingkiran hak-hak hidup Masyarakat Adat sering dibenarkan karena cara hidup

mereka dianggap irelevan terhadap kemajuan zaman dan tidak memiliki keterikatan bermakna (dapat dibuktikan di atas kertas) terhadap tanah tempat mereka tinggal (Samson 2017, p. 13).

Tidak hanya lewat industri ekstraktif, penyingkiran keberadaan Masyarakat Adat juga terjadi lewat sistem pendidikan hari ini. Dengan adanya revolusi industri 4.0, lembaga pendidikan dituntut untuk menjawab kebutuhan pasar (Fauzi, 2021) yang kini mengalami proses digitalisasi dan otomatisasi skala besar. Hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan pengetahuan adat yang sifatnya informal dan kontekstual, bertolak belakang dengan sistem pendidikan nasional yang seragam dari Sabang hingga Merauke. Pendidikan model ini mengajarkan para siswanya ilmu pergi, yaitu ilmu yang mendorong pelajar di kampung untuk pergi menuju kota dan bersama-sama menyambut revolusi industri 4.0 dengan meramaikan lapangan kerja yang tersedia. Berkaca pada situasi di atas, kita sebenarnya sudah mendapat gambaran betapa rentannya eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia di tengah arus revolusi industri 4.0 hari ini karena pertama, legitimasi hukum yang telah ada tidak cukup untuk memberikan perlindungan hak dan posisi yang setara bagi Masyarakat Adat dengan warga negara lainnya; kedua, paradigma berpikir masyarakat hari ini masih terus mereproduksi logika-logika kolonial tentang pembangunan dan kemajuan melalui industrialisasi.

Meski begitu, seiring dengan laju destruksi yang berlangsung, Masyarakat Adat di seluruh Indonesia memulai beragam inisiatif untuk merespons penyingkiran yang tengah berlangsung terhadap keberadaan mereka. Salah satunya adalah upaya mengintegrasikan teknologi dengan kebudayaan secara berkelanjutan dan berbasis komunitas yang dilakukan oleh Masyarakat Adat di Kasepuhan Ciptagelar, Jawa Barat. Masyarakat di sana membuat pembangkit listrik tenaga air skala kecil (mikrohidro) menggunakan kincir kayu untuk menerangi 55 rumah dan memulai stasiun televisi sendiri yang diberi nama CIGA TV untuk mendokumentasikan kegiatan adat masyarakat dan memperkenalkannya kepada generasi muda di kawasan tersebut (Praja, Silvia, dan Syifa, 2021, p. 120-122).

Para pemuda adat yang tergabung dalam Badan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) juga menginisiasi gerakan serupa yang dinamakan 'Gerakan Pulang Kampung'. Gerakan ini mengedepankan semangat ilmu pulang, kebalikan dari spirit

pendidikan modern yang mengajarkan ilmu pergi. Gerakan pulang kampung mengajak para pemuda adat yang berada di kota untuk pulang ke kampung, memberdayakan komunitasnya dengan mempertahankan akar tradisi adat, memulai ekonomi kolektif skala komunitas dengan memanfaatkan kekayaan alam di wilayah adat secara berkelanjutan, dan menjaga kampung dari gempuran sektor industri ekstraktif yang kini menerjang dari berbagai arah (AMAN, 2020).

Inisiatif-inisiatif ini sering disebut juga sebagai ekonomi pemulihan yang dianggap sebagai lawan dan alternatif dari ekonomi pertumbuhan (Sembiring et al. 2021). Ekonomi pemulihan ini mendorong penurunan pertumbuhan ekonomi (degrowth) dengan mengurangi secara drastis kegiatan produksi-konsumsi (prosumsi) kita hari ini dan mengedepankan kepemilikan ruang hidup bersama (the commons), dimana tanah, air, udara, semua yang ada di alam bersifat gratis dan dapat dimanfaatkan secara kolektif serta berkelanjutan (ibid, 44). Praktik-praktik ekonomi alternatif tersebut sejatinya sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak dahulu kala dengan berpegang pada adat dan tradisi di daerah masing-masing. Hari ini, praktik ekonomi tersebut dinamakan 'Ekonomi Nusantara' (ibid, 54). Melihat situasi hari ini, Ekonomi Nusantara barangkali dapat menjadi cahaya di ujung terowongan gelap pembangunan sistem saat ini yang lahir dari penindasan dan penjajahan berkepanjangan.

#### **D. Kesimpulan**

Revolusi Industri 4.0 yang tengah berlangsung hari ini menempatkan Masyarakat Adat dalam posisi rentan. Hal ini disebabkan oleh kegiatan industri yang seringkali berlangsung di kawasan rural yang jauh dari pusat kota dan menjadi tempat tinggal kelompok masyarakat yang menjaga keberlangsungan tradisi mereka dan memiliki keterikatan kuat dengan tanah tempat mereka berada. Perputaran modal di era globalisasi yang arusnya semakin kencang dan seperti tidak mengenal batas ruang serta waktu juga menjadi faktor yang menyebabkan meluasnya ekspansi kapital hingga ke wilayah adat. Gambaran ini membuktikan bahwa proses industrialisasi, terlepas dari bentuk transformasi yang dibawakannya, akan selalu menciptakan penyingkiran dan pemusnahan kelompok masyarakat yang menolak tunduk pada standar-standar peradaban dan

kesejahteraan hari ini. Masyarakat Adat menjadi salah satu dari kelompok masyarakat tersebut. Merespons situasi ini, berbagai komunitas adat di Indonesia mencoba menciptakan suatu konsep ekonomi tanding terhadap ekonomi pertumbuhan yang berkarakter pemangsa. Ekonomi tanding ini disebut sebagai Ekonomi Nusantara dan mengedepankan penekanan kegiatan produksi-konsumsi secara drastis (degrowth) serta kepemilikan ruang hidup secara lokal, kolektif dan berbasis komunitas (*the commons*).

### Daftar Pustaka

- Boutet, Jean-Sebastien. 2015. *'The Revival of Quebec's Iron Ore Industry: Perspectives on Mining, Development and History'*. Calgary: University of Calgary Press.
- Böhm, Steffen, Zareen Pervez Bharucha, dan Jules Pretty. (eds.) (2014). *'Ecocultures: Blueprints for Sustainable Communities'*. London: Routledge.
- Colin, Samson. (2017), 'The Idea of Progress, Industrialization, and the Replacement of Indigenous Peoples: The Muskrat Falls Megadam Boondoggle', *Social Justice*, 44(4), p5-17.
- Dahlianoor, J. N. dan. (2008). *EKSISTENSI HUKUM ADAT DAYAKKALIMANTAN TENGAH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0*. *May*, 41–57.
- Even Sembiring, Boy Jerry, Tanti Budi Suryani, dan Bagas Yusuf Kausan. 2021. 'Ekonomi Nusantara: Tawaran Solusi Pulihkan Indonesia'. Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI.
- Farakhiyah, R., & Irfan, M. (2019). EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT TERGERUS OLEH KEBUTUHAN ZAMAN Studi Analisis Konflik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan di Kuningan yang Terusir dari Tanah Adatnya Sendiri dengan Teori Identitas. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 44.
- Fathoni, M. Y. (2021). Peran Hukum Adat Sebagai Pondasi Hukum Pertanahan Nasional Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 219–236.
- Fioramonti, Lorenzo. 2013. 'Produk Domestik Bruto: Sejarah dan Realitas Politik di Balik Angka Pertumbuhan Ekonomi'. Soerjadinata, Lita. 2017. *Marjin Kiri: Tangerang Selatan, Indonesia*.
- Mies, Maria dan Vandana Shiva. (eds.) (2014). *'Ecofeminism'*. London: Zed Books.
- Pearcey, Mark. 2013, *'Indigenous peoples, civilization and the expansion of international society: An 'inter-societal' perspective'*, p2-4.
- Praja, Wina Nurhayati., Athari, Silfia Nova., & Alifah, Syifa Nur. (2021), 'Dinamika Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0', *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), p120-122.

- Pratiwi, A. E., Sugeng Triyono, Rezkiyanto, I., Asad, A. S., & Khollimah, D. A. (2018). Eksistensi masyarakat adat di tengah globalisasi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 170–179.
- Subroto, A. (2019). Peran Negara Dalam Menjaga Eksistensi Masyarakat Hukum Adat. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 59.
- Sugiswati, B. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia. *Perspektif*, 17(1), 31.
- Uppal, Shveta. (eds.) (2021). *'Themes in World History'*. Delhi: NCERT.